



**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Maret, *Rest Area* ke Pidsus**

**PELABAI** - Dari hasil pemeriksaan dua pejabat Pemprov Bengkulu dan dua pejabat Pemkab Lebong, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong mulai mengendus sejumlah kegagalan pengerjaan Rest Area B'dan Kileak. Antara lain fasilitas toilet, musala dan bangunan kios pedagang yang begitu cepat mengalami kerusakan. Padahal bangunan itu belum sempat difungsikan.

Dalam waktu dekat, jaksa akan memeriksa kontraktor pelaksana dari CV. Tapan Permata Konstruksi. Tujuannya untuk memastikan apakah bangunan yang ada di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang itu senilai dengan pagu anggaran yakni Rp 1,2 miliar dari Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun 2018. "Keterangan dari empat saksi yang sempat kami periksa sebelumnya, kami

nilai sudah cukup. Target kami, bulan ini (Februari, red) penyelidikan di Intelijen selesai. Maret sudah dilimpahkan ke Pidsus (pidana khusus, red) guna proses hukum lebih lanjut," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong, Fadil Regan, SH, MH melalui Kasi Intelijen, Imam Hidayat, SH, MH.

Tidak dipungkirinya, indikasi korupsi di balik pekerjaan rest area itu semakin menguat ketika Pemkab Lebong menolak menerima hibah aset provinsi itu. Pihaknya memandang, persoalannya tidak hanya sebatas kerusakan atas fasilitas yang dikerjakan. Namun lebih kepada mengapa aset provinsi yang masuk kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Provinsi Bengkulu itu begitu cepat rusak. Sementara kondisinya sama sekali belum dimanfaatkan.

"Namun untuk materi pemeriksaan, mohon maaf belum bisa saya sampaikan. Intinya kasus ini akan segera kami serahkan ke pidsus karena terindikasi korupsi. Kami harap rekanan pelaksana dari CV. Tapan Permata dapat bersikap kooperatif memenuhi panggilan kami agar proses hukumnya menjadi terang," ungkap Imam.

Dilansir sebelumnya, dari empat pejabat yang sempat diperiksa, dua diantaranya merupakan pejabat Pemkab Lebong. Yakni Yu selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lebong dan Pu selaku Kabid Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD). Sementara 2 pejabat lainnya adalah RP selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Gu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari DPKPP Provinsi Bengkulu. (sca)